

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum (pemilu) merupakan kebutuhan mutlak bagi setiap negara modern dalam rangka menegakkan sistem demokrasi. Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, dengan pengertian bahwa negara Indonesia dikelola dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Melalui pemilu yang demokratis, pergantian pemerintahan dapat dilaksanakan secara damai, pun dengan pemilu ruang politik publik terbuka luas. Selain kebebasan (kebebasan pers, kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, kebebasan beragama), persamaan di depan hukum, dan distribusi pendapatan yang adil, pemilu adalah salah satu sarana untuk menilai kualitas demokrasi.

Reformasi mengantarkan masyarakat ke era keterbukaan (transparansi) dan kebebasan berpendapat dalam kehidupan demokrasi. Era Reformasi yang diawali dengan terjadinya krisis moneter dan krisis ekonomi terus berkembang secara simultan dengan sikap antusias seluruh lapisan masyarakat untuk berpolitik, dengan berpolitik masyarakat dapat ikut serta membangun bangsa. Kehidupan politik di masyarakat dapat dirasakan dimana-mana, karena masyarakat menginginkan adanya perubahan yang mendasar di negara ini. Banyak cara yang dapat dilakukan masyarakat untuk mencapai keinginannya, salah satunya dengan berpartisipasi dalam pemilu.

Kecenderungan determinasi partai politik terhadap penyelenggaraan pemilu hendaknya akan sirna. Harapannya, pasca reformasi, cara yang ditempuh Orde Baru dalam menyelenggarakan pemilu beranjak jauh. Hal ini karena sudah dihapusnya asas monoloyalitas terhadap penguasa sehingga diharapkan nafsu politik tidak lagi bercokol. Kalau seumpama keberpihakan kepada partai politik atau penguasa masih tersisa, maka kondisi ini tentu sering dimanfaatkan oknum untuk menjadi alat kekuasaannya.

Demokratisnya pemilu bisa diukur dengan kejujuran dan keadilan yang diterapkan terhadap pelaksanaannya. Hasil pendeteksian secara jujur atas kekeliruan ataupun kesalahan di masa lalu akan banyak menentukan arah dan ruang lingkup dalam skala reformasi. Reformasi yang berangkat dari kesadaran yang sungguh jujur akan kekeliruan dan kesalahan memilih langkah di masa lalu pada hakikatnya adalah refleksi untuk terus memelihara berlakunya keniscayaan sejarah bangsa.

Sistem penyelenggaraan pemilu yang baik tak bisa berjalan maksimal tanpa didukung rencana yang tersusun rapi dan sistematis. Agenda melaksanakan pemilu yang bersih menjadi prioritas, terkait adanya indikasi kecacatan dengan kehidupan politik dalam bingkai daerah maupun tingkat nasional.

Pemilu 1999 dan pemilu-pemilu sebelumnya dikenal dengan sistem pemilihan partai yang dilaksanakan dalam satu tahap menggunakan sistem proporsional berdasarkan stelsel daftar. Sistem pemilihan ini memiliki beberapa kelemahan, diantaranya dapat menimbulkan disintegrasi bermacam-

macam golongan dalam masyarakat, umumnya para pemilih tidak memperhatikan kandidat saat melakukan pencoblosan, kurangnya loyalitas wakil terpilih kepada daerah yang memilihnya, dan sukar terbentuk pemerintahan yang stabil. Untuk menjawab berbagai kelemahan pada Pemilu 1999 dan pemilu-pemilu sebelumnya dilakukan perubahan terhadap sistem dan pelaksanaan pemilu. Pada pelaksanaannya di tahun 2004, Pemilu Legislatif 2004 dilakukan dengan mencoblos tanda gambar partai dan nama kandidat, sedangkan pemilihan presiden dilakukan dengan memilih nama kandidat. Pemilu yang dilaksanakan tersebut selanjutnya dikenal dengan nama pemilu langsung. Kesuksesan pelaksanaan pemilu pada tahun 2004 bukan tanpa kekurangan, Pemilu 2009 sistem ini disempurnakan lagi.

Pada Pemilu Legislatif 2009 terjadi perubahan sistem pemilu yang berbeda dari pemilu sebelumnya, ini terkait dengan mekanisme suara terbanyak yang berhak menjadi caleg terpilih. Mekanisme ini menyebabkan faktor individu calon legislatif (caleg) menjadi lebih diperhitungkan selain dari ideologi partai.

Pemilu 2009 memiliki makna yang sangat strategis bagi perjalanan bangsa Indonesia. Pada satu sisi, dengan memperbaiki sistem dan aturan pelaksanaannya, Pemilu 2009 diharapkan lebih baik dari pada pemilu sebelumnya. Baik sistem, maupun aturan pelaksanaannya merupakan perubahan atau penyempurnaan untuk menjawab berbagai kekurangan dan kelemahan sebelumnya.

Dimulai pada 2004, Pemilu 2004 dan selanjutnya (Pemilu 2009) yang diadakan di segenap bumi nusantara merupakan pemilu yang menerapkan pemilihan secara langsung, baik di tataran pemilihan legislatif (DPR RI, DPD RI, DPRD Propinsi dan Kabupaten/kota) maupun eksekutif (pemilihan presiden dan wakil, serta pemilihan gubernur dan wakil, bupati dan wakil/walikota dan wakil secara langsung). Setiap calon langsung dipilih oleh rakyat yang memiliki dan menggunakan hak pilihnya di segenap TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang telah ditentukan.

Proses pemilihan legislatif langsung akan menghadirkan partisipasi politik masyarakat yakni terkait dengan peran serta masyarakatnya dalam memberikan dukungan suara kepada partai politik dan kandidat yang ada.

Salah satu indikator berjalannya suatu sistem politik secara demokratis dan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam bidang politik adalah adanya keterlibatan warga negara untuk turut berpartisipasi di dalam pemilu. Sehingga keterlibatan warga negara menjadi suatu syarat mutlak bagi sebuah bangsa yang ingin membangun dengan konsep demokrasi.

Adanya perubahan pilihan politik masyarakat pada pemilu dari partai politik dan kandidat tertentu kepada lainnya dapat diartikan bahwa masyarakat mengalami peningkatan rasionalitas terhadap pemilihan partai politik dan kandidat. Diketahui bahwa masyarakat Kota Yogyakarta mengalami perubahan dalam menentukan pilihannya, terjadi perubahan atau perpindahan simpatisan partai tertentu kepada partai lainnya. Hal ini dapat diketahui dari jumlah perbandingan perolehan suara untuk tiap-tiap partai politik peserta pemilu pada

Pemilu Legislatif 2004 dan Pemilu Legislatif 2009. Adanya perubahan sikap masyarakat dalam partisipasi politik pada Pemilu Legislatif 2009 merupakan bagian dan fenomena yang menarik untuk dikaji dan diteliti.

Dalam konteks politik, Yogyakarta sejak lama sudah dikenal sebagai basis kaum abangan nasionalis. Kedekatan sosio politik masyarakat Yogyakarta pada ideologi nasionalis tak lepas dari peran Kraton Yogyakarta sebagai patron kultural dan sosok yang cenderung mengedepankan paradigma nasionalisme dalam berkomunikasi politik kepada rakyat Yogyakarta. Salah satu contoh konkret adalah penggabungan wilayah ini dengan 'bayi' negara Republik Indonesia pada masa kemerdekaan serta dukungan kuat Sultan Hamengku Buwono IX terhadap perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia.¹

Yogyakarta dalam perjalanannya kemudian dikenal sebagai kota pelajar. Banyaknya perguruan tinggi dengan beragam pilihan program studi dan kondusifitas kota dalam mendukung suasana belajar akhirnya menjadi magnet bagi para pelajar yang umumnya meneruskan cita-cita pendidikannya pada perguruan tinggi di Kota Yogyakarta. Kota ini diwarnai dinamika pelajar dan mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Selanjutnya, dengan banyaknya pendatang dari berbagai entitas masing-masing daerah, Yogyakarta kemudian dikenal pula sebagai miniatur Indonesia. Tak jarang dalam pemilu yang berlangsung pendatang dari berbagai daerah tadi juga merupakan pemilih.

¹ Sofian Munawar Asgart, Perilaku Pemilih di Kota Yogyakarta: Fenomena Pemilu 2004 dan 2009, www.kompasiana.com/, 13 April 2011

Masa-masa awal dimulainya penelitian ini, masyarakat Kota Yogyakarta baru saja melangsungkan Pemilu 2009 dan dihadapkan pula pada pesta demokrasi lainnya yakni Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Periode 2011-2016. Hemat penulis, selain masih segarnya ingatan masyarakat akan keberlangsungan Pemilu 2009, Masyarakat Kota Yogyakarta juga sedang menyimak proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah tadi, sehingga dalam proses penyelesaiannya nanti penelitian ini benar-benar melalui data valid yang tentunya sangat berguna dalam menjaga kualitas penelitian.

Kalau berkaca pada pemilu pertama pada 1955 tampak jelas bahwa kelompok abangan nasionalis cukup dominan dengan hadirnya PKI, PNI dan Grinda, kekuatan politik yang saat itu berbasiskan kaum priayi atau bangsawan. Sementara Masyumi, partai Islam yang secara nasional merupakan partai terkuat saat itu hanya mampu meraih peringkat keempat di Yogyakarta. Rekaman Pemilu 1955 antara lain didokumentasikan dengan baik oleh harian Kedaulatan Rakyat (KR) Yogyakarta. Pemilu 1955 sangat kental menonjolkan warna ideologis dan cita-cita partai sehingga perbedaan partai seperti antara Masyumi, PKI, dan PNI tampak secara kentara.

Potret kekuatan politik itu tampaknya masih tidak banyak bergeser bila dikomparasikan dengan konteks politik pasca reformasi kini. Pemilu 1999 sebagai pemilu pertama pasca reformasi tampaknya telah mengkonfirmasi benarnya anggapan Kota Gudeg ini sebagai basis kelompok abangan dimana PDI Perjuangan sebagai representasi kelompok abangan nasionalis memperoleh kemenangan cukup signifikan. Dengan meraih 35.689.071

(33,8%) suara, PDI Perjuangan berhasil menguasai pentas politik nasional dengan perolehan 154 (32,97%) kursi di Senayan.

Demikian halnya potret politik dua pemilu berikutnya pada 2004 dan 2009. Meskipun suara PDI Perjuangan mengalami penurunan baik pada Pemilu 2004 maupun 2009, namun partai berlambang kepala banteng dengan moncong putih ini tetap meraih suara tinggi. Pemilu 2004 dan 2009 bahkan menunjukkan bahwa penurunan suara PDI Perjuangan tidak serta-merta memperlihatkan penurunan suara kaum nasionalis. Ini terbukti antara lain dari peningkatan suara partai berbasis nasionalis lainnya, yaitu Partai Demokrat yang terus mengalami peningkatan secara sangat signifikan.

Namun demikian, keunggulan suara partai berbasis massa nasionalis di Kota Yogyakarta tetap saja dibayang-bayangi kehadiran partai 'kuasi' agama atau partai berbasis massa Islam, seperti PAN, PKS, PPP, PKB, dan PBB. Beberapa partai ini nyatanya menjadi pesaing yang perlu diperhitungkan. Partai-partai ini menjadi alternatif konstituen khususnya muslim, terbukti dari perolehan suara PAN dan PKS yang cukup signifikan pada Pemilu 2004.

Namun pada Pemilu 2009 kondisinya kembali berbalik. Hampir semua partai berbasis massa Islam seperti PAN, PPP, PKB, dan PBB mengalami penurunan dan bahkan kehilangan kursinya sama sekali. Sementara itu, meskipun PDI Perjuangan dan Golkar juga mengalami penurunan, namun basis dukungan kalangan abangan nasionalis justru meningkat lewat partai nasionalis baru yang kian berkibar, yaitu Partai Demokrat. Kian menyebarnya dukungan kaum nasionalis tradisional kepada Partai Demokrat maupun partai nasionalis

sekuler lainnya bisa jadi bakal makin menyurutkan pamor partai nasionalis mapan seperti PDI Perjuangan dan Golkar. Belum lagi kehadiran partai nasionalis baru seperti Gerindra dan Hanura yang gencar mempromosikan nilai-nilai keberpihakan kepada rakyat.

Secara lebih rinci, perolehan suara partai dapat disimak pada perolehan suara pemilu yang akan dideskripsikan berikut. Pada Pemilu 2004 diikuti 24 partai yang bertarung, 5 (lima) partai yang memperoleh suara signifikan, yaitu PDI Perjuangan, PAN, PKS, Partai Golkar, dan Partai Demokrat. Tabel berikut merupakan sebaran angka mutlak yang diperoleh masing-masing partai di setiap kecamatan dalam Pemilu Legislatif 2004 di Kota Yogyakarta.

Tabel 1.1:
Perolehan Suara Lima Partai Utama pada Pemilu 2004 di Kota Yogyakarta
Berdasarkan Kecamatan

No.	Kec	PDIP		PAN		Golkar		PKS		Demokrat		Lain-lain		Total	
		Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%
1.	MJ	8.166	2,14	8.597	2,25	3.148	0,82	3.032	0,79	3.412	0,89	5.888	1,54	32.243	8,44
2.	KT	4.535	1,19	5.416	1,42	2.642	0,69	1.381	0,36	2.182	0,57	2.932	0,77	19.088	5,00
3.	MG	8.659	2,27	7.938	2,08	3.205	0,84	3.099	0,81	2.717	0,71	5.390	1,41	31.008	8,12
4.	PA	3.305	0,86	2.096	0,55	1.222	0,32	830	0,22	1.004	0,26	1.655	0,43	10.112	2,65
5.	GM	3.833	1,00	4.172	1,09	1.405	0,37	929	0,24	1.055	0,28	2.971	0,78	14.365	3,76
6.	NG	3.838	1,00	5.230	1,37	1.929	0,50	1.785	0,47	1.177	0,31	3.117	0,82	17.076	4,47
7.	WB	6.689	1,75	7.260	1,90	2.590	0,68	2.787	0,73	1.986	0,52	3.843	1,01	25.155	6,58
8.	TR	10.401	2,72	6.537	1,71	4.059	1,06	3.767	0,99	2.818	0,74	6.284	1,64	33.866	8,86
9.	JT	7.781	2,04	4.369	1,14	2.853	0,75	2.007	0,53	2.408	0,63	4.506	1,18	23.924	6,26
10.	GT	6.712	1,76	2.414	0,63	1.997	0,52	988	0,26	1.565	0,41	3.152	0,82	16.828	4,40
11.	DN	5.760	1,51	3.664	0,96	2.092	0,55	1.661	0,43	1.716	0,45	3.838	1,00	18.731	4,90
12.	GK	11.002	2,88	8.151	2,13	6.182	1,62	5.917	1,55	5.326	1,39	8.634	2,26	45.212	11,83
13.	UH	12.807	3,35	18.696	4,89	6.552	1,71	9.322	2,44	5.916	1,55	12.341	3,23	65.634	17,18
14.	KG	5.071	1,33	10.054	2,63	3.373	0,88	3.047	0,80	2.071	0,54	5.239	1,37	28.855	7,55
Jumlah		98.559	25,79	94.594	24,76	43.249	11,32	40.552	10,61	35.353	9,25	69.790	18,26	382.097	100

Diolah dari Data KPUD Kota Yogyakarta, Pemilu 2004

Untuk melihat pergeseran perilaku pemilih pada Pemilu 2009 ada baiknya juga untuk mengkomparasikan tabel 1.1 tersebut dengan sebaran angka mutlak yang diperoleh masing-masing partai di setiap kecamatan dalam Pemilu Legislatif 2009. Angka-angkanya dapat disimak pada tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2:

Perolehan Suara Lima Partai Utama pada Pemilu 2009 di Kota Yogyakarta
Berdasarkan Kecamatan

No.	Kec	Demokrat		PDIP		PAN		PKS		Golkar		Lain-lain		Total	
		Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%
1.	MJ	5.443	2,72	3.102	1,55	2.504	1,25	1.948	0,97	999	0,50	3.507	1,75	17.503	8,73
2.	KT	2.634	1,31	1.302	0,65	1.598	0,80	879	0,44	598	0,30	2.386	1,19	9.397	4,69
3.	MG	4.489	2,24	3.057	1,53	2.196	1,10	1.559	0,78	1.140	0,57	3.760	1,88	16.201	8,08
4.	PA	1.647	0,82	1.324	0,66	515	0,26	440	0,22	413	0,21	1.069	0,53	5.408	2,70
5.	GM	2.126	1,06	1.542	0,77	1.364	0,68	559	0,28	477	0,24	1.967	0,98	8.035	4,01
6.	NG	2.103	1,05	1.821	0,91	1.397	0,70	856	0,43	747	0,37	2.689	1,34	9.613	4,80
7.	WB	3.940	1,97	2.635	1,31	1.631	0,81	1.250	0,62	1.014	0,51	3.024	1,51	13.494	6,73
8.	TR	5.129	2,56	3.627	1,81	1.756	0,88	1.915	0,96	1.610	0,80	3.637	1,81	17.672	8,82
9.	JT	3.475	1,73	3.308	1,65	2.248	1,12	974	0,49	1.109	0,55	2.821	1,41	13.935	6,95
10.	GT	2.646	1,32	2.930	1,46	984	0,49	794	0,40	1.083	0,54	2.015	1,01	10.452	5,21
11.	DN	2.982	1,49	2.652	1,32	947	0,47	1.049	0,52	725	0,36	2.086	1,04	10.441	5,21
12.	GK	6.132	3,06	3.990	1,99	2.245	1,12	2.081	1,04	2.134	1,06	4.372	2,18	20.954	10,45
13.	UH	8.929	4,46	5.270	2,63	4.026	2,01	4.259	2,12	1.819	0,91	7.305	3,64	31.608	15,77
14.	KG	3.652	1,82	1.849	0,92	3.327	1,66	1.784	0,89	1.397	0,70	3.704	1,85	15.713	7,84
Jumlah		55.327	27,61	38.409	19,16	26.738	13,34	20.347	10,15	15.265	7,62	44.340	22,12	200.426	100

Diolah dari Data KPUD Kota Yogyakarta, Pemilu 2009

Dua tabel tersebut tampak jelas memperlihatkan adanya pergeseran suara yang cukup signifikan antara Pemilu 2004 dan Pemilu 2009. PDI Perjuangan tersingkirkan dari gelar jawara sebelumnya, suaranya mengalami penurunan yang sangat signifikan dari 98.559 suara (25,79%) pada Pemilu 2004 menjadi 38.409 (19,16) pada Pemilu 2009. Partai lainnya yang mengalami penurunan secara tajam adalah PAN. Perolehan suara partai berlambang matahari terbit ini melorot dari 94.594 (24,76%) pada Pemilu 2004 menjadi 26.738 (13,34%)

pada Pemilu 2009. Hal yang sebaliknya justru terjadi pada Partai Demokrat, partai ini akhirnya berhasil menjadi juara di Kota Yogyakarta dengan perolehan suaranya yang mengalami kenaikan cukup fantastis, dari 35.353 suara (9,25%) pada Pemilu 2004 menjadi 55.327 (27,61%) pada Pemilu 2009.

Sementara itu, dua partai besar lainnya yaitu PKS dan Partai Golkar meskipun mengalami sedikit penurunan namun boleh dibilang relatif mampu bertahan. PKS yang meraih suara 40.552 (10,61%) pada Pemilu 2004 mengalami sedikit penurunan menjadi 20.347 (10,15%) pada Pemilu 2009. Adapun Partai Golkar, raihan suaranya juga menurun dari 43.249 (11,32%) pada Pemilu 2004 menjadi 15.265 (7,62%) pada Pemilu 2009. Pemilu 2009 juga ditandai dengan mencuatnya beberapa partai baru yang meraih suara cukup signifikan meski tidak ada diantaranya menduduki tangga lima besar. Peta perolehan suara dan pergeserannya antara Pemilu 2004 berbanding Pemilu 2009 dari lima partai utama di Kota Yogyakarta secara lebih ringkas dapat disimak pada tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3:

Perbandingan Perolehan Suara Lima Partai Utama pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 di Kota Yogyakarta

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara			
		2004		2009	
		Total	Prosentase	Total	Prosentase
1.	PDI Perjuangan	98.559	25,79%	38.409	19,16%
2.	PAN	94.594	24,76%	26.738	13,34%
3.	Golkar	43.249	11,32%	15.265	7,62%
4.	PKS	40.552	10,61%	20.347	10,15%
5.	Demokrat	35.353	9,25%	55.327	27,60%
	Lain-lain	69.800	18,27%	44.340	22,12%
	Total	382.107	100%	200.426	100%

Diolah dari Data KPUD Kota Yogyakarta, Pemilu 2004 dan 2009

Sejatinya Partai Demokrat merupakan pemenang yang sesungguhnya dalam konteks Pemilu 2009 di Kota Yogyakarta. Sebagai jawara, suara Partai Demokrat mampu meraih lonjakan suara hampir 50% dari Pemilu 2004 ke Pemilu 2009. Demikian sebaliknya, meskipun PDI Perjuangan mampu mempertahankan perolehan suara tetap tinggi dalam dua ajang pemilu itu, PDI Perjuangan telah mengalami 'kekalahan' karena basis dukungan pemilihnya tampak makin berkurang.

Bisa jadi penambahan suara yang diraih Partai Demokrat adalah limpahan suara dari kantong-kantong PDI Perjuangan dan Partai Golkar yang secara sosiologis memiliki basis sosial kultural yang sama yakni kalangan abangan-nasionalis. Limpahan yang sama juga didapatkan partai baru seperti Partai Gerindra dan Partai Hanura yang juga secara sosiologis memiliki akar sosial kultural abangan-nasionalis yang relatif sama dengan PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Dugaan ini mungkin cukup beralasan karena jika dikalkulasi, besarnya angka penurunan suara PDI Perjuangan dan Partai Golkar pada Pemilu 2009 relatif sama dengan besarnya angka kenaikan yang diraih Partai Demokrat serta perolehan suara yang diraih Partai Gerindra dan Partai Hanura.

Analisis serupa juga dapat diterapkan atas menurunnya perolehan suara PAN serta bertahannya suara PKS dan PPP. Pergeseran perilaku pemilih tampaknya lebih banyak terjadi di dalam basis sosial serupa. Kalau kita simak tabel 1.1 dan tabel 1.2 di atas tampak jelas bahwa perolehan suara PAN menurun hampir di semua kecamatan. Pada Pemilu 2004 PAN masih unggul

dan dominan di tujuh kecamatan penting, yaitu Mantrijeron, Kraton, Gondomanan, Ngampilan, Wirobrajan, Umbulharjo, dan Kotagede. Namun pada Pemilu 2009 PAN tidak mampu mempertahankan keunggulan perolehan suaranya walau di satu kecamatan pun. Kehadiran Partai Matahari Bangsa (PMB) yang seringkali *diplestkan* sebagai “Partai Muhammadiyah Bangets” atau “PAN Perjuangan” diduga banyak pihak telah turut menggerogoti dan menggembosi konstituen PAN yang sebagian besar berasal dari basis yang sama dengan PMB, yaitu jamaah Muhammadiyah.

Partisipasi politik masyarakat Kota Yogyakarta yang terekam dalam proses pelaksanaan Pemilu 2009 setidaknya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain; *Pertama*; Kesadaran politik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (sistem politik). Kepercayaan kepada pemerintah merupakan penilaian seseorang terhadap pemerintah: apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak. Apabila seseorang memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi maka partisipasi politik cenderung aktif. Sebaliknya, apabila kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah rendah maka partisipasi politik cenderung pasif tertekan (*apatis*).

Kedua, Tingkat perhatian, motivasi yang dimiliki masyarakat dalam berpartisipasi politik. Tentang keterlibatan tiap individu di dalam masyarakat agar tujuan-tujuannya tercapai melalui saluran politik, dalam agenda pemilu yang ada.

Ketiga, Tingkat kemampuan dan kecakapan yang dimiliki individu-individu di dalam masyarakat. Kemampuan untuk memikul tanggung jawab, mengambil keputusan, kemampuan untuk memilih dan berkesadaran politik yang kritis, juga berorientasi kepada pelayanan lingkungan dan minat memecahkan problematikanya.

Keempat, Sosialisasi politik. Tinggi rendahnya kualitas partisipasi politik juga disebabkan oleh intensitas sosialisasi politik bagi masyarakat Kota Yogyakarta, kegiatan yang di dalamnya terjadi transformasi berbagai nilai, keyakinan, dan perasaan, yang membentuk kultur politik dengan baik dari generasi ke generasi. Partai-partai politik merupakan agen demi terciptanya proses tersebut. Adanya sosialisasi politik akan mengakibatkan terjadinya partisipasi politik.

Kelima, Budaya politik (*political culture*). Budaya politik merupakan keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik dan pandangan hidup pada umumnya. Budaya politik mencerminkan faktor subyektif, mengutamakan dimensi psikologis dari suatu sistem politik, yaitu sikap-sikap, sistem-sistem kepercayaan, simbol-simbol yang dimiliki individu-individu dan beroperasi di dalam seluruh masyarakat, serta harapan-harapannya.

Sebagai contoh, keyakinan agama yang diimani oleh individu. Islam mendorong pemeluknya untuk memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran, memilih, mengkritik dan mengawasi penguasa, dan seterusnya. Ini merupakan dorongan internal dalam melakukan partisipasi politik.

Budaya politik dapatlah dipandang sebagai kondisi yang mewarnai corak kehidupan masyarakat. Budaya politik adalah pola tingkah laku individu yang berkaitan dengan kehidupan yang dihayati oleh para anggota sistem politik.

Diduga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pilihan politik masyarakat antara Pemilu Legislatif 2004 dan 2009 di Kota Yogyakarta. Adanya perubahan pilihan massa pemilih pada dua periode pemilihan umum tersebut dapat menggambarkan perilaku massa pemilih (*voters*) itu sendiri. Setelah partai-partai yang menjadi pilihan *voters* dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pilihan politik *voters* diketahui, selanjutnya dapat diketahui pula pola perubahan pilihan *voters* tersebut.

Sepertinya memang tidak ada argumen tunggal yang dapat menjelaskan pola pergeseran suara dan perilaku pemilih secara komprehensif. Dalam konteks pergeseran perilaku pemilih di Kota Yogyakarta, fenomena yang terjadi pada Pemilu 2004 dan Pemilu 2009 tentu dapat dianalisis dari berbagai segi dan beragam sudut pandang. Namun demikian, dengan kajian terhadap perilaku pemilih setidaknya dapat turut memberi gambaran mengenai pola pergeseran perilaku pemilih yang tampak berimplikasi pada perubahan peta dan konstelasi politik elektoral di Kota Yogyakarta dari waktu ke waktu.

Pemilu langsung merupakan fenomena politik terkini yang menjadi konsumsi publik, pemilu dalam beberapa hal mampu menghasilkan perubahan. Karenanya, reaksi publik atas pelaksanaan pemilu layak untuk dikaji dan disikapi secara bijak.

B. Perumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang di atas, didapati rumusan masalah sebagai berikut:

1. *Faktor-faktor apa sajakah yang berpengaruh pada perubahan pilihan politik masyarakat di Kota Yogyakarta ?*
2. *Bagaimanakah pola perubahan pilihan politik masyarakat pada Pemilihan Umum Legislatif 2004 dan 2009 Kota Yogyakarta ?*

C. Kerangka Dasar Teori

1. Pemilihan Umum (Pemilu)

Dalam ilmu politik dikenal dua macam pemahaman tentang demokrasi. *Pertama*, pemahaman demokrasi secara normatif. *Kedua*, pemahaman demokrasi secara empirik. Dalam pemahaman normatif, demokrasi merupakan suatu kondisi yang secara ideal ingin diselenggarakan oleh suatu negara. Sedangkan dalam pemahaman empirik, demokrasi dikaitkan dengan kenyataan penerapan demokrasi dalam tataran kehidupan politik praktis.² Indonesia, dalam pemahaman normatif, mencantumkan keinginannya untuk menjalankan sistem demokrasi sejalan dengan ketentuan UUD 1945. Namun yang menarik untuk diamati adalah bahwa pemahaman demokrasi secara normatif tersebut belum tentu terwujud secara empirik dalam kehidupan politik.

Untuk melihat apakah demokrasi yang normatif diterapkan dengan baik dalam kehidupan politik secara empirik, para ahli politik membuat berbagai indikator untuk mengukurnya. Antara lain Huntington yang

² Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999. Hal. 3 – 4

mendefinisikan demokrasi sebagai suatu sistem politik dimana para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat di dalam sistem politik, para calon secara bebas bersaing untuk mendapatkan suara, dan hampir semua penduduk dewasa berhak untuk memberikan suaranya. Selain itu, demokrasi juga mensyaratkan adanya kebebasan sipil dan politik, yaitu adanya kebebasan untuk berbicara, berpendapat, berkumpul, berorganisasi, yang dibutuhkan untuk perdebatan politik, dan pelaksanaan kampanye pemilihan umum. Suatu sistem dikatakan tidak demokratis bila oposisi dikontrol dan dihalangi dalam mencapai apa yang dapat dilakukannya, seperti koran-koran oposisi dibredel, hasil pemungutan suara dimanipulasi atau perhitungan suara tidak benar.³

Sedangkan Dahl mendefinisikan demokrasi sebagai sebuah sistem politik dimana para anggotanya saling memandang antara yang satu dengan yang lainnya sebagai orang-orang yang sama dalam segi politik, secara bersama-sama berdaulat, memiliki kemampuan, sumber daya, dan lembaga-lembaga yang mereka perlukan untuk memerintah diri mereka sendiri. Indikator demokrasi yang diajukan Dahl adalah sebagai berikut:⁴

- a. Adanya kontrol terhadap kebijakan pemerintah
- b. Adanya pemilihan umum yang diadakan secara damai dalam jangka waktu tertentu, terbuka, dan bebas
- c. Semua orang dewasa mempunyai hak untuk memberikan suaranya dalam pemilihan umum

³ Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokrasi Ketiga*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1995. Hal. 5

⁴ Robert Dahl, *Demokrasi dan Para Pengkritiknya*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1992. Hal. 1

- d. Hampir semua orang dewasa mempunyai hak untuk mencalonkan diri sebagai kandidat dalam pemilihan umum
- e. Setiap warga negara memiliki hak politik, seperti kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat, termasuk mengkritik pemerintah
- f. Setiap warga negara berhak mendapatkan akses informasi alternatif yang tidak dimonopoli oleh pemerintah atau kelompok tunggal lain
- g. Setiap warga negara berhak untuk membentuk dan bergabung dengan lembaga-lembaga otonom, termasuk partai politik dan kelompok kepentingan yang berusaha untuk mempengaruhi pemerintah dengan mengikuti pemilihan umum dan dengan perangkat-perangkat lainnya.

Melihat pendapat Huntington maupun Dahl tersebut, maka jelas bahwa adanya pemilihan umum yang dilaksanakan secara damai dalam jangka waktu tertentu, terbuka, bebas dan partai-partai politik yang eksis sebagai peserta pemilu merupakan indikator demokrasi dalam kehidupan suatu sistem politik.

Pelaksanaan Pemilu 2009 didasarkan pada UU no. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana disebutkan:

Pasal 1 ayat (1)

Pemilihan umum, selanjutnya disebut pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pasal 2

Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3

Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Pasal 4;

(1) Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.

(2) Tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi:

- a. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
- b. pendaftaran peserta pemilu;
- c. Penetapan peserta pemilu;
- d. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
- e. pencalonan anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- f. masa kampanye;
- g. masa tenang;
- h. pemungutan dan penghitungan suara;
- i. penetapan hasil pemilu; dan
- j. pengucapan sumpah/janji anggota DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

(3) Pemungutan suara dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan.⁵

Dari pasal-pasal tersebut bisa dilihat upaya konstitusional untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis, sebagaimana dimaksud Dahl.

Setidaknya, meminjam istilah Afan Gaffar, undang-undang tersebut mencerminkan pemilu yang ingin diwujudkan pada tataran empirik dari aspek pemahaman demokrasi secara normatif.

a. Pengertian Pemilu

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

⁵ Lihat *Undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD*, Sekretariat Negara, Jakarta

Pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali untuk memilih anggota DPR pusat mau pun daerah dan DPD⁶.

Proses Pemilu yang bebas, jujur dan adil dapat mewujudkan tatanan suatu negara yang aman, adil dan sejahtera. Pemilu dapat juga diartikan sebagai akad antara rakyat dan pemimpinnya, dimana rakyat mempercayakan suaranya pada para pemimpin yang dipilihnya⁷.

b. Tujuan dan Fungsi Pemilu

Secara umum Pemilu memiliki tujuan sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan kedaulatan rakyat.
- 2) Sebagai perwujudan hak asasi politik rakyat.
- 3) Untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, dan wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR pusat mau pun daerah, dan DPD.
- 4) Melaksanakan pergantian personil pemerintahan secara damai, aman, dan tertib (secara konstitusional).
- 5) Menjamin kesinambungan pembangunan nasional⁸.

Pemilu dalam berbagai kesempatan memiliki beragam fungsi, tidak hanya berfungsi untuk mengganti para pemimpin, tetapi juga berfungsi sebagai :

- 1) Media bagi rakyat untuk menyuarakan pendapatnya.
- 2) Mengubah kebijakan.
- 3) Mengganti pemerintahan.

⁶ Lihat *Undang-undang nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD*, Sekretariat Negara, Jakarta. Bab I, pasal 1 (1)

⁷ Hairus Salim, dkk., *Islam dan Pemilu*, Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial, Yogyakarta, 2004

⁸ Budiyanto, *Dasar-dasar Ilmu Tata Negara*, Erlangga, Jakarta, 2000

4) Menuntut pertanggungjawaban.

5) Menyalurkan aspirasi lokal⁹.

c. Asas Pemilu

Dalam bukunya, Askuri menyatakan bahwa sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil¹⁰.

d. Sistem Pemilu

Supaya pemilu bisa berjalan secara damai, terbuka, dan bebas, sudah barang tentu diperlukan sebuah sistem pemilu yang disepakati bersama. Sistem pemilu dalam ilmu politik dipahami sebagai suatu kumpulan metode atau cara warga masyarakat memilih para wakil mereka, baik yang berada di lembaga legislatif (DPR, DPD, DPRD) ataupun jabatan politik eksekutif (presiden, gubernur, bupati/walikota).

Sistem pemilihan merupakan mekanisme untuk menentukan komposisi dalam jabatan politik atau jabatan pemerintahan. Sistem pemilihan menyediakan sarana utama bagi partisipasi politik para individu yang hidup dalam masyarakat yang luas, kompleks, dan modern. Banyak sarjana berpendapat bahwa sistem pemilihan merupakan suatu ciri tegas sebuah sistem demokrasi.¹¹

Supaya pemilu dapat berjalan sukses maka diperlukan sebuah sistem pemilu. Tidak diragukan lagi bahwa sistem pemilu memainkan

⁹ Hairus Salim, dkk., *Op. Cit*

¹⁰ Askuri, *Panduan Pendidikan Pemilih untuk Pemilu DPR, DPD, dan DPRD*, KPU Propinsi DIY, Yogyakarta, 2008. Hal. 2

¹¹ Henry B. Mayo, *An Introduction to Democratic Theory*, Oxford University Press, New York, 1960. Hal. 72 – 106

peranan penting dalam sebuah sistem politik, walaupun tidak terdapat kesepakatan mengenai seberapa penting sistem pemilu dalam membangun struktur sebuah sistem politik. Giofani Sartori menyebutkan bahwa sistem pemilu adalah, “sebuah bagian yang paling esensial dari kerja sistem politik. Pemilihan umum bukan hanya instrumen politik yang paling mudah dimanipulasi, ia juga membentuk sistem kepartaian dan mempengaruhi spektrum representasi”. Tekanan juga diberikan oleh Arend Lijphart yang mengatakan, “sistem pemilu adalah elemen paling mendasar dari demokrasi perwakilan”.

Menurut Benjueno Theodore, istilah sistem pemilu memiliki definisi yang sempit dan ketat, yaitu: sistem pemilihan umum adalah rangkaian aturan dimana pemilih mengekspresikan preferensi politik mereka, dan suara para pemilih diterjemahkan menjadi kursi.¹²

Definisi ini mengisyaratkan bahwa sistem pemilihan umum mengandung elemen-elemen struktur kertas suara dan cara pemberian suara, besar distrik, serta penerjemahan suara menjadi kursi. Dengan demikian hal-hal seperti administrasi pemilihan umum dan hak pilih, walaupun penting berada di luar lingkup pembahasan sistem pemilihan umum. Adapun elemen dari sistem pemilihan umum adalah:¹³

¹² Theodore Benjueno, Sistem Pemilihan Umum: Pemilu Indonesia, www.blogspot.com/, 10 April 2010

¹³ Khanafi, *Peran HMI DIPO Cabang Yogyakarta dalam Pergulatan Politik pada Pemilu 2009*, Skripsi, IP UMY, Yogyakarta, 2009. Hal. 23 – 26

1) Besaran Distrik

Yang dimaksud dengan distrik adalah wilayah geografis suatu negara yang batas-batasnya dihasilkan melalui suatu pembagian untuk tujuan pemilihan umum. Dengan demikian luas sebuah distrik dapat sama besar dengan besar wilayah administrasi pemerintahan, dapat pula berbeda. Definisi besar distrik adalah berapa banyak anggota lembaga perwakilan yang akan dipilih dalam satu distrik pemilihan. Besar distrik bukan berarti berapa jumlah pemilih yang ada dalam distrik tersebut. Berdasarkan definisi tersebut maka kita dapat membedakan distrik menjadi distrik beranggota tunggal (*single member district*) dan distrik beranggota jamak (*multi member district*)

Tabel 1.4:
Distrik Beranggota Jamak¹⁴

Jumlah Kursi yang Diperebutkan	Sub Kategori
2 – 5	Distrik Kecil
6 – 10	Distrik Sedang
> 10	Distrik Besar

2) Struktur Kertas Suara

Struktur kertas suara adalah cara penyajian pilihan di atas kertas suara. Cara penyajian pilihan ini menentukan bagaimana pemilih kemudian memberikan suara. Jenis pilihan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu; kategorikal, dimana pemilih hanya bisa memilih satu partai atau calon, dan ordinal, dimana pemilih memiliki kebebasan lebih dan

¹⁴ *Ibid.* Hal. 31

dapat menentukan preferensi atau urutan dari partai atau calon yang diinginkan.

3) *Electrol Formula* (Jenis-jenis Sistem Pemilu)

Electrol pemula adalah bagian dari sistem pemilihan umum yang membicarakan penerjemahan suara menjadi kursi. Termasuk di dalamnya adalah rumus yang digunakan untuk menerjemahkan perolehan suara menjadi kursi, serta batas ambang pemilihan.

Tabel di bawah ini memberikan gambaran ringkas mengenai beberapa jenis sistem pemilihan umum.

Tabel 1.5:
Jenis-jenis Sistem Pemilu¹⁵

Sistem	Ukuran Distrik	Tipe	Deskripsi
<i>Firs Past the Pos</i> (FPTP)	Tunggal	Pluralitas	Kandidat yang memperoleh suara terbanyak yang terpilih, walaupun tidak mencapai <i>mayoritas sederhana</i>
Sistem dua putaran	Tunggal	Mayoritas	Jika tidak ada kandidat yang mencapai mayoritas sederhana, diadakan pemilihan-pemilihan lanjutan di antara dua kandidat dengan suara terbanyak. Pemenang pemilihan lanjutan yang akan terpilih.
<i>Alternative Vote</i>	Tunggal	Mayoritas	Pilihan menentukan pilihan sesuai dengan urutan preferensi. Jika tidak ada calon yang memperoleh suara mayoritas berdasarkan preferensi pertama, maka calon dengan preferensi

¹⁵ *Ibid.* Hlm 32. Lihat juga Theodore Benjuino, *Op. Cit*

			pertama paling sedikit disingkirkan dan didistribusikan sesuai dengan pilihan keduanya. Proses diulangi sampai ada calon dengan suara mayoritas.
<i>Block Vote (BV)</i>	Jamak	Pluralis	Pemilih memberikan pilihan sebanyak jumlah kursi tersedia. Jika tersedia n kursi, maka n orang kandidat dengan suara terbanyak yang terpilih.
Sistem Dua Putaran	Jamak	Semi Proporsional	Pemilih memberikan satu pilihan. Jika tersedia n kursi, maka n orang kandidat dengan suara terbanyak yang terpilih.
<i>Single Transferable Vote (STV)</i>	Jamak	Proporsional	Pemilih menentukan pilihan sesuai dengan preferensi. Kandidat dengan pilihan pertama mencapai quota akan terpilih. Calon dengan preferensi pertama paling sedikit disingkirkan dan didistribusikan sesuai pilihan keduanya. Proses diulangi sampai diperoleh calon yang mencapai quota.
<i>Parallel Vote</i>	Campuran	Semi Proporsional	Legislator terdiri dari mereka yang terpilih lewat pluralitas atau mayoritas dalam distrik beranggota tunggal ditambah mereka yang terpilih secara proporsional dalam distrik beranggota banyak
<i>Mixed Member Proportional (MPP)</i>	Campuran	Proporsional	Legislator terdiri dari mereka yang terpilih lewat pluralitas atau mayoritas dalam distrik beranggota tunggal ditambah mereka yang terpilih secara proporsional dalam distrik

			beranggota banyak. Kursi proporsional diberikan untuk mengkompensasi efek disproportional yang timbul dari hasil distrik beranggota tunggal
Representasi Proporsional Daftar	Jamak	Proporsional	Pemilih memilih dari daftar yang disediakan, kursi diberikan sesuai proporsi suara yang diterima oleh partai. Kandidat terpilih berdasarkan urutannya dalam daftar.

Namun dalam memilih sistem pemilu harus memperhatikan implikasi dan berusaha mengantisipasi akibat-akibat dari kompleksitas faktor secara komprehensif. Tidak ada sistem pemilu yang sempurna dan berlaku umum di semua negara. Kunci utama dalam memilih sistem pemilu adalah mengoptimalkan pencapaian tujuan pemilu dan mempersempit akibat negatif pemilu, khususnya konflik kekerasan. Berikut perubahan-perubahan sistem pemilu yang terjadi di Indonesia dari Orde Baru hingga Pemilu 2009, yaitu:

- a) Pada masa Orde Baru hingga Pemilu 1999 Indonesia menggunakan sistem pemilu representasi proporsional daftar tertutup
- b) Pada Pemilu 2004 Indonesia menggunakan sistem pemilu representasi proporsional daftar terbuka, dengan penetapan calon terpilih masih dibatasi dengan perolehan suara sebesar BPP (Bilangan Pembagi Pemilih)

c) Sedangkan pada Pemilu 2009 Indonesia menggunakan sistem pemilu representasi proporsional daftar terbuka dengan penetapan suara calon terbanyak.

Menurut Afan Gaffar¹⁶, untuk menentukan sistem pemilu yang tepat bagi sebuah negara atau masyarakat, ada beberapa yang harus diperhatikan yakni:

a) Sistem Distrik/Sistem Pluralistik (*Single Member Constituency*).

Sistem ini merupakan sistem yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis yang lazim disebut distrik. Setiap distrik mempunyai satu wakil dalam parlemen.

b) Sistem Representasi Proporsional (*Multi Member Constituency*).

Gagasan pokok dalam sistem ini adalah bahwa jumlah kursi yang diperoleh suatu partai sesuai dengan jumlah suara diperolehnya.

4) *Distric Magnitude* (Besaran Kursi dalam Distrik)

Distric magnitude menentukan jumlah wakil rakyat yang dipilih di setiap distrik. Besaran distrik bisa berbeda-beda tergantung pada kepadatan penduduknya. Semakin besar *magnitude* sebuah distrik, makin besar partai-partai kecil terlindungi.

5) *Electoral Threshold*

Yaitu jumlah dukungan minimal yang harus diperoleh seorang atau sebuah partai untuk memperoleh kursi di lembaga perwakilan.

¹⁶ Afan Gaffar, *Op. Cit.*, Hlm. 255 – 256

Pemilu Legislatif 2009 menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Artinya, pemilih diberi kesempatan untuk mencoblos partai sekaligus mencoblos satu nama calon di bawah tanda gambar partai politik peserta pemilu dalam surat suara.

e. Penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2009

Untuk mewujudkan cita-cita negara demokrasi, setiap lima tahun sekali pemerintah secara rutin menyelenggarakan pemilihan umum. Sejak Orde Reformasi sudah tiga kali diselenggarakan pemilu yakni pada tahun 1999, 2004 dan 2009.

Pemilu 2009 sebagai penyempurnaan dari sistem Pemilu Legislatif 2004. Perubahan pada pemilu yang terjadi tidak hanya pada sistem atau aturan pelaksanaannya, perbedaan yang menonjol antara Pemilu Legislatif 2009 dengan pemilu pada Orde Baru terletak pada pemilihan langsungnya. Pemilu 2009 memberi kesempatan lebih besar kepada pemilih untuk menentukan secara langsung siapa saja wakilnya yang akan duduk di kursi legislatif dengan turut serta hadirnya satu lembaga baru yakni DPD RI. Berbeda dengan Pemilu 1999 misalnya, rakyat memilih wakil-wakilnya yang duduk di legislatif secara tidak langsung. Perlu pula dicatat, pada pemilu 1999 rakyat tidak memilih anggota DPD RI, karena pada saat itu lembaga ini belum terbentuk.

Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

f. Hak Pilih Aktif

Hak pilih aktif adalah hak setiap warga negara yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk memilih anggota-anggota yang akan duduk dalam suatu badan perwakilan.

Syarat-syarat untuk mempunyai hak pilih adalah:

- 1) Telah berusia 17 tahun sudah/pernah kawin
- 2) Terdaftar sebagai pemilih
- 3) Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya
- 4) Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Partisipasi Politik

a. Pengertian Partisipasi Politik

Keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah berdampak dan mempengaruhi masyarakatnya. Atas dasar ini maka masyarakat berhak untuk ikut berpartisipasi dalam bidang politik.

Partisipasi politik dapat diartikan sebagai hak untuk berpartisipasi atau ikut serta dalam pembuatan keputusan politik, untuk memberi suara, atau untuk menduduki jabatan pemerintahan¹⁷.

Gaffar¹⁸ mengartikan partisipasi politik sebagai upaya warga masyarakat baik secara individu ataupun kelompok untuk ikut serta mempengaruhi pembentukan kebijaksanaan publik dalam sebuah negara.

¹⁷ Colin MacAndrew, *Perbandingan Sistem Politik*. Terjemahan Mochtar Mas'ood, Gadjahmada University Press, Yogyakarta, 2001

¹⁸ Afan Gaffar, *Menampung Partisipasi Politik Rakyat dalam Jurnal Sosial dan Politik, Volume 1, Nomor 1*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UGM, 1997

Partisipasi politik memberikan arti adanya kesempatan bagi warga negara untuk mengungkapkan pandangan dan kepentingannya dalam proses perumusan kebijakan, dan memperjuangkan pandangan tersebut baik secara individual maupun bersama-sama.

Mc Closky¹⁹ mengartikan partisipasi politik sebagai kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam pemilihan penguasa, secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijaksanaan umum.

Menurut Surbakti²⁰ yang dimaksud partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Sesuai dengan istilah partisipasi, maka partisipasi (politik) berarti keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan) dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

b. Bentuk-bentuk Partisipasi Politik

Bentuk-bentuk yang dipandang sebagai cara warga negara mengekspresikan partisipasi politiknya.

MacAndrew²¹ menguraikan bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai berikut:

- 1) Konvensional:
 - a) Pemberian suara atau *voting*
 - b) Diskusi politik

¹⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993

²⁰ Deden Faturohman dan Wawan Sobari, *Pengantar Ilmu Politik*, UMM Press, Malang, 2002

²¹ Colin MacAndrew, *Op. Cit.*

- c) Kegiatan kampanye
 - d) Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan
 - e) Komunikasi individual dengan pejabat politik dan administratif
- 2) Non Konvensional:
- a) Pengajuan petisi
 - b) Berdemonstrasi
 - c) Konfrontasi
 - d) Mogok
 - e) Tindakan kekerasan fisik terhadap harta benda (perusakan, pengeboman, pembakaran)
 - f) Tindakan kekerasan fisik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan)
 - g) Perang gerilya dan revolusi.

Seluruh tingkatan partisipasi politik ini secara praktis mungkin sekali memiliki perbedaan dalam setiap sistem politik, terutama bila terdapat perbedaan ideologi dominan dalam sistem politik antara demokratis dengan non demokratis, karena akan memiliki implikasi yang besar pada pembatasan-pembatasan partisipasi politik rakyat atau perluasan-perluasan partisipasi politik.

Selain itu meskipun suatu sistem politik sama-sama demokratis atau sama-sama non demokratis, bentuk-bentuk partisipasi politik dan tingkatan-tingkatannya sangat mungkin terdapat perbedaan.

Maran²² mengemukakan cara-cara berpartisipasi dalam politik antara lain:

- 1) Pemungutan suara (*voting*)
- 2) Kontak-kontak berdasarkan inisiatif warga negara
- 3) Aktifitas kampanye
- 4) Partisipasi kooperatif.

Dari pandangan beberapa ahli atau sarjana tentang pengertian partisipasi politik dan bentuk-bentuk partisipasi politik, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik adalah keikutsertaan warga negara secara langsung atau tidak langsung dalam proses pengambilan maupun pelaksanaan kebijakan umum pemerintah.

c. Faktor-faktor Pendorong Partisipasi Politik

Faktor pendorong adalah motivasi seseorang untuk berbuat sesuatu²³. Partisipasi politik dapat dilakukan atas dorongan-dorongan yang ada pada seseorang.

- 1) Yang rasional bernilai, didasarkan pada penerimaan secara rasional akan nilai-nilai suatu kelompok.
- 2) Yang efektif dan emosional, didasarkan atas kebencian terhadap suatu ide, organisasi, atau individu.
- 3) Yang tradisional, didasarkan atas penerimaan norma tingkah laku individu dari suatu kelompok sosial.
- 4) Yang rasional bertujuan, didasarkan atas keuntungan pribadi.

²² Raga Rafael Maran, *Pengantar Sosiologi Politik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001

²³ *Ibid*

Dari beberapa pendapat para ahli atau sarjana di atas dapat disimpulkan sebab-sebab seseorang turut berpartisipasi dalam politik adalah berbagai motivasi yang ada pada dirinya dan kelompoknya, tentang bagaimana caranya agar tujuan-tujuannya tercapai melalui saluran-saluran politik yang ada.

3. Perilaku Pemilih

a. Kebangkitan Kembali Politik Aliran

Salah satu wacana yang mengemuka seiring dengan munculnya partai-partai politik Islam di Era Reformasi ini dan juga partai-partai yang berbasis suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) lainnya adalah kebangkitan politik aliran. Yang khas pada fenomena itu adalah pengelompokan politik terjadi menurut kesamaan orientasi budaya, yaitu ikatan sekelompok orang kepada *dominant culture* dalam kelompoknya.

Politik aliran erat kaitannya dengan masalah ideologi politik. Greene²⁴ menyebutkan bahwa ideologi merupakan ide-ide yang berhubungan secara logis dan yang menerangkan prinsip atau nilai yang memberikan legitimasi kepada lembaga-lembaga dan perilaku politik. Ideologi dapat dipergunakan untuk membenarkan *status quo* atau membenarkan usaha untuk mengadakan perubahan.

Ideologi merupakan cita-cita yang dalam dan luas, bersifat jangka panjang dan dalam hal-hal dasar bersifat universal atau yang diyakini bersifat universal. Ideologi merupakan milik suatu kelompok manusia

²⁴ Kamarudin, *Partai Politik Islam di Pentas Reformasi*, Visi Publishing, Jakarta, 2003

yang dapat mengidentitaskan dirinya dengan isi ajaran tersebut. Ideologi juga mengikat kelompok, sering pula membenarkan dan mempertahankan sikap perbuatan kelompok. Ia juga menunjukkan kepentingan kelompok sesuai dengan dasar ajaran yang dianut.

Kemunculan kembali partai-partai politik yang bercorak aliran pasca Reformasi turut mempengaruhi perilaku massa pemilih, sebab secara bersamaan perilaku pilihan massa pemilih masih tidak jauh beranjak dari primordialisme dan tradisionalisme. Alasan munculnya kembali politik aliran pada Pemilu Legislatif 2009 antara lain:

1) Politik aliran merupakan ciri khas perpolitikan Indonesia

Santoso²⁵ berpendapat bahwa partai politik yang berideologi bukan Pancasila merupakan cerminan sifat asli politik di Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen, sehingga memberikan kemungkinan bagi berkembangnya politik aliran.

2) Politik aliran merupakan representasi ideologi yang ada di masyarakat.

Selama masih banyak aliran/ideologi politik yang berkembang di masyarakat maka politik aliran akan tetap ada dan keberadaannya tidak dapat diingkari.

3) Reaksi dari ketidakbebasan berpolitik berdasarkan ideologi tertentu.

Kebijakan rezim Orde Baru tidak memberi kebebasan bagi pluralitas ideologi untuk berkembang di masyarakat. Ketika rezim Orde Baru jatuh, maka keinginan untuk memunculkan ideologi yang

²⁵ *Ibid*

dianut oleh masyarakat mendapat momentum yang tepat untuk diaktualisasikan.

Aliranisme belum sepenuhnya lekang dari perpolitikan Indonesia. Pola-pola afiliasi aliran yang ditunjukkan pada Pemilu 1955 muncul kembali pada Pemilu Legislatif 2009. Ada dua pola besar dalam perpolitikan Indonesia, yaitu pola aliran dan pola mesianik. Keduanya masuk dalam ranah emosional perilaku pemilih. Ketika massa pemilih meninggalkan ketergantungan pada pola patronase aliran, tidak serta-merta mereka lalu beranjak memasuki wilayah rasionalitas, namun mereka justru menguatkan pola mesianik yang sama-sama berasaskan emosi.

Partai politik merupakan wadah untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dan keyakinan yang dianut oleh suatu komunitas. Bagi umat Islam terdapat doktrin yang menyebut Islam merupakan sistem kehidupan yang mengatur baik secara prinsip maupun teknis seluruh aspek kehidupan. Hal ini yang melatari umat Islam untuk menjadikan Islam sebagai ideologi dalam berpolitik, maka wajar jika masyarakat memilih partai politik Islam sebagai wadah untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dan keyakinan yang dianutnya.

b. Segmentasi Perilaku Pemilih

Pemilihan umum berfungsi sebagai prosedur untuk memberikan legitimasi atau pengabsahan dalam penugasan seseorang pada jabatan

tertentu di dalam jabatan politis pemerintahan. Aspek penting yang lain pada pemilu adalah perilaku individu dalam pemilihan umum tersebut.

Newman²⁶ mengelompokkan pemilih menjadi empat segmen berdasarkan perilaku:

- 1) Segmen pemilih rasional: kelompok pemilih yang memfokuskan perhatian pada faktor isu dan kebijakan kontestan dalam menentukan pilihannya.
- 2) Segmen pemilih emosional: Kelompok pemilih yang dipengaruhi oleh perasaan-perasaan tertentu seperti kesedihan, kekhawatiran dan kegembiraan terhadap harapan tertentu dalam menentukan pilihan politiknya.
- 3) Segmen pemilih sosial: kelompok yang mengasosiasikan kontestan pemilu dengan kelompok-kelompok sosial tertentu dalam menentukan pilihan politiknya.
- 4) Segmen pemilih situasional: kelompok pemilih yang dipengaruhi oleh faktor-faktor situasional tertentu dalam menentukan pilihannya. Segmen ini digerakkan oleh perubahan dan akan menggeser pilihan politiknya jika terjadi kondisi-kondisi tertentu.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Pemilih

Isu-isu dan kebijakan politik sangat menentukan perilaku pemilih. Sekelompok orang bisa saja memilih sebuah partai atau kandidat politik karena dianggap sebagai representasi dari agama atau keyakinannya.

²⁶ Adman Nursal, *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden, PT*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004

Tetapi kelompok lainnya memilih karena partai atau kandidat tertentu dianggap representasi dari kelas sosialnya. Ada juga kelompok yang memilih sebagai ekspresi dari sikap loyal pada partai atau figur tokoh tertentu.

Nursal²⁷ menyimpulkan beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih:

1) *Social Imagery* atau Citra Sosial (Pengelompokan Sosial)

Social imagery adalah citra kandidat atau partai dalam pikiran pemilih mengenai “berada” di dalam kelompok sosial mana atau tergolong sebagai apa sebuah partai atau kandidat politik.

2) Identifikasi Partai

Identifikasi partai yakni proses panjang sosialisasi kemudian membentuk ikatan yang kuat dengan partai politik atau organisasi kemasyarakatan yang lainnya. Dengan identifikasi partai, seolah-olah semua pemilih relatif mempunyai pilihan yang tetap. Dari pemilu ke pemilu, seseorang selalu memilih partai atau kandidat yang sama.

3) *Emotional Feelings* (Perasaan Emosional)

Emotional feeling adalah dimensi emosional yang terpancar dari sebuah kontestan atau kandidat yang ditunjukkan oleh *policy* politik yang ditawarkan.

²⁷ *Ibid*

4) *Candidate Personality* (Citra Kandidat)

Candidate personality mengacu pada sifat-sifat pribadi yang penting yang dianggap sebagai karakter kandidat. Beberapa sifat yang merupakan *candidate personality* adalah artikulatif, *welas asih*, stabil, energik, jujur, tegar, dan sebagainya.

5) *Issues and Policies* (Isu dan Kebijakan Politik)

Komponen *issues and policies* mempresentasikan kebijakan atau program yang dijanjikan oleh partai atau kandidat politik jika menang pemilu. *Platform* dasar yang sering ditawarkan oleh kontestan pemilu kepada para pemilih adalah kebijakan ekonomi, kebijakan luar negeri, kebijakan dalam negeri, kebijakan sosial, kebijakan politik dan keamanan, kebijakan hukum, dan karakteristik kepemimpinan.

6) *Current Events* (Peristiwa Mutakhir)

Current events mengacu pada himpunan peristiwa, isu, dan kebijakan yang berkembang menjelang dan selama kampanye. *Current events* meliputi masalah domestik dan masalah luar negeri. Yang termasuk masalah domestik misalnya tingkat inflasi, prediksi ekonomi, gerakan separatis, ancaman keamanan, merajalelanya korupsi, dan sebagainya. Yang termasuk masalah luar negeri misalnya perang antar negara-negara tetangga, invasi ke sebuah negara, dan sebagainya yang mempunyai pengaruh baik langsung maupun tidak langsung kepada para pemilih.

7) *Personal Events* (Peristiwa Personal)

Personal events mengacu pada kehidupan pribadi dan peristiwa yang pernah dialami secara pribadi oleh seorang kandidat, misalnya skandal seksual, skandal bisnis, menjadi korban rezim tertentu, menjadi tokoh pada perjuangan tertentu, ikut berperang mempertahankan tanah air, dan sebagainya.

8) *Epistemic Issues* (Faktor-faktor Epistemik)

Epistemic issues adalah isu-isu pemilihan yang spesifik yang dapat memicu keinginan para pemilih mengenai hal-hal baru. *Epistemic issues* sangat mungkin muncul di tengah-tengah ketidakpercayaan publik kepada institusi-institusi politik yang menjadi bagian dari sistem yang berjalan.

d. Perilaku Pemilih Indonesia

Gerakan Reformasi pada tahun 1998 mengantarkan perilaku komunikasi interpersonal jauh lebih bebas dibandingkan sebelumnya. Perubahan lingkungan politik tersebut mengubah pengetahuan, keyakinan, dan pemaknaan para pemilih terhadap partai politik. Perubahan ini bermuara pada pembentukan pola sikap dan perilaku baru terhadap partai-partai politik. Namun tingkat perubahan itu berbeda tergantung pada individu dan kelompok yang menghadapi perubahan lingkungan politik itu.

Perilaku pemilih di Indonesia, dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

1) Orientasi Agama

Faktor agama tidak dapat diabaikan dalam memetakan perilaku pemilih. Pemilih yang muslim cenderung memilih partai Islam, dan sebaliknya pemilih yang non-muslim cenderung memilih partai non-Islam.

2) Faktor Kelas Sosial dan Kelompok Sosial Lainnya

Karakteristik sosial dan pengelompokan sosial yang meliputi usia, jenis kelamin, pekerjaan, latar belakang keluarga, aspek geografis, faktor kelas atau status ekonomi, kegiatan-kegiatan dalam kelompok formal dan informal dan lainnya memiliki peranan besar dalam membentuk sikap, persepsi, dan orientasi seseorang.

3) Faktor Kepemimpinan dan Ketokohan

Baik pemimpin formal maupun pemimpin informal, memiliki kekuatan yang dapat menggerakkan masyarakat mencapai tujuan tertentu termasuk mempengaruhi perilaku pemilih.

4) Faktor Identifikasi

Para pemilih di Indonesia menunjukkan kecenderungan memiliki kesamaan pilihan partai politik antara orang tua dan anak. Selain itu juga ada kecenderungan bahwa partai yang dipilih sama dengan partai yang dikagumi.

5) Orientasi Isu

Tingkat pendidikan yang tinggi akan meningkatkan daya kritis masyarakat terhadap isu dan program yang ditawarkan oleh kontestan pemilu kepada masyarakat.

6) Orientasi Kandidat

Pengaruh orientasi kandidat terhadap pola perilaku pilihan politik tidak tampak pada pemilu-pemilu zaman Orde Baru. Dengan sistem pemilu yang memilih partai, umumnya para pemilih tidak memperhatikan kandidat saat melakukan pencoblosan. Sebab penetapan kandidat merupakan kebijakan pusat yang seringkali tidak memperhatikan aspirasi daerah. Sebagian besar pemilih tidak mengetahui siapa yang akan mewakili mereka di parlemen setelah pemilu diikuti. Pada Pemilu Legislatif 2009 dengan sistem pemilihan tanda gambar partai dan nama kandidat, faktor kandidat legislatif memberi pengaruh besar terhadap perilaku pemilih.

7) Kaitan dengan Peristiwa

Faktor penting lain yang mempengaruhi pilihan masyarakat Indonesia adalah kaitan isu dan kandidat yang diajukan dengan peristiwa-peristiwa yang masih mempengaruhi pikiran para pemilih. Tekanan politis terhadap tokoh-tokoh dan partai tertentu pada masa silam dapat membentuk simpati sebagian pemilih, penderitaan terhadap ketidakadilan rezim otoriter pada masa lampau dapat menjadi simbol penderitaan sebagian pemilih sehingga pemilih tersebut akan

mengidentifikasi dirinya dengan tokoh-tokoh atau organisasi yang menjadi korban.

8) Rekonfigurasi Papan Catur Politik

Sebuah partai atau kandidat tertentu biasanya memiliki satu atau beberapa kelompok massa andalan (basis massa). Kelompok ini merupakan tambang emas perolehan suara, karena kelompok tersebut mempunyai preferensi kuat dan selalu memilih partainya.

e. Perilaku Pemilih DIY

Berdasarkan orientasi politik dan ideologi, partai politik peserta pemilu dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok. Partai nasionalis, partai nasionalis-religius, dan partai agama.

Peserta Pemilu 2009 diikuti oleh 24 (dua puluh empat) partai politik. Partai-partai politik yang bercorak aliran muncul kembali dalam bentuk yang termodifikasi pada Pemilu 2009. Pada saat yang bersamaan perilaku pilihan massa pemilih (*voters*) masih bersifat primordialisme dan tradisionalisme. Pemilu 2004 khususnya di DIY masih diwarnai oleh politik aliran sebagaimana pemilu sebelumnya, karena perilaku pemilih relatif tidak berubah. Pemilih cenderung mengidentifikasi diri dengan partai yang memiliki basis ideologi tertentu, bukan memilih partai berdasarkan program. Konsekuensinya, jika tidak memiliki basis dukungan massa atau figur yang kuat, partai tertentu yang hanya menjual program tidak akan banyak memperoleh suara.

Aliran menjadi kekuatan politik sepanjang sejarah kepartaian di Indonesia. Kekuatan aliran yang dominan hingga saat ini adalah nasionalis dan Islam.

Melalui pendekatan sosiologis dan psikologis-sosial, dapat digambarkan bahwa kelompok pemilih tradisional, seperti santri dan abangan atau Islam dan nasionalis masih cenderung memilih partai lama yang berideologi sama dengan identifikasi mereka. Hal ini jelas terlihat dari hasil Pemilu Legislatif 2009, khususnya untuk daerah pemilihan DIY menunjukkan bahwa aliranisme belum sepenuhnya lekang dan tampaknya dalam kurun waktu dekat ke depan kenyataan pemilih rasional belum akan terwujud dan ini harus dipahami sungguh-sungguh oleh para pemain politik dalam menentukan langkah strategi ke depan.

f. Pola Perubahan Pilihan Politik

Perubahan pilihan politik terjadi secara kontinu di dalam setiap masyarakat. Ini berkaitan erat dengan perubahan kondisi internal dan eksternal sebagai dampak dari sifat dan interaksi antar kelompok sosial yang ada, pergantian aktor politik dan kepemimpinan suatu masyarakat, dan surutnya generasi tua dan munculnya generasi muda ke pentas politik.

Perubahan-perubahan politik yang cukup berarti dapat disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut, munculnya pemimpin yang kharismatik, adanya gerakan-gerakan kultural dan intelektual, dan pasang-surutnya kelompok-kelompok sosial tertentu, termasuk para elite

yang memiliki kepentingan sosial yang berbeda. Namun umumnya diakui bahwa perubahan politik yang disebabkan oleh faktor ekonomi adalah sangat penting. Dewasa ini tampak jelas bahwa pengaruh ekonomi dan teknologi terhadap kehidupan politik terjadi melalui aksi-aksi kelompok sosial tertentu.

Perubahan politik dapat terjadi secara rutin maupun non rutin (*disruptif*). Mengenai tipe atau pola perubahan politik itu sendiri dapat dirinci sebagai berikut:

1) Perubahan yang terjadi secara gradual dan mendadak

Perubahan politik yang terjadi secara gradual dilembagakan dalam persaingan di antara partai politik dan dalam berbagai gerakan sosial serta kelompok kepentingan yang menentang pemerintah.

2) Perubahan besar dan perubahan kecil

Menurut Tom Bottomore²⁸ ciri-ciri perubahan besar antara lain:

- a) Perubahan yang mengakibatkan terjadinya reorganisasi penting di dalam aparat pemerintahan dan hubungan antara pemerintah dan rakyat.
- b) Perubahan yang menyebabkan terjadinya restrukturalisasi hubungan-hubungan sosial lainnya, termasuk modifikasi dalam pengaturan hierarkis berbagai kelompok sosial yang ada.
- c) Perubahan yang terjadi dengan kekerasan dan perubahan yang terjadi dengan damai.

²⁸ Raga Rafael Maran, *Op. Cit.*

Konflik dan kekerasan seringkali menandai perubahan besar dalam kehidupan politik. Revolusi dan perang melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan dari sistem politik Orde Lama ke sistem politik Orde Baru dan dari sistem politik Orde Baru ke sistem politik Orde Reformasi, kedua perubahan politik tersebut disertai dengan konflik dan kekerasan yang memakan korban jiwa sangat besar.

Untuk mengetahui pola perubahan pilihan politik suatu masyarakat dapat dilihat dari tipe kebudayaan politik masyarakat tersebut. Menurut Almond dan Verba²⁹ kebudayaan politik suatu bangsa diartikan sebagai distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik di antara masyarakat bangsa itu. Kebudayaan politik dapat juga diartikan sebagai pola tingkah laku individu yang berkaitan dengan kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik.

Menurut Sastroatmodjo³⁰ dengan memahami kebudayaan politik, paling tidak dapat diperoleh dua manfaat yaitu:

- 1) Sikap-sikap warga negara terhadap sistem politik akan mempengaruhi tuntutan-tuntutan, respon-responnya, dukungannya, dan orientasinya terhadap sistem politik tertentu.
- 2) Dengan memahami hubungan antara kebudayaan politik dengan sistem politik, maksud-maksud individu melakukan kegiatannya dalam sistem politik atau faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran politik dapat dimengerti.

²⁹ Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*, IKIP Press, Yogyakarta, 1995

³⁰ *Ibid*

Persepsi dan budaya politik yang telah ada dan melekat dalam masyarakat turut mempengaruhi jalannya proses sosialisasi dan turut menentukan peran dalam proses perubahan pilihan politik. Almond dan Verba³¹ membuat klasifikasi tipe-tipe budaya politik. Secara garis besar kebudayaan politik dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1) Budaya Politik Parokial

Masyarakat secara umum tidak menaruh minat yang begitu besar terhadap objek politik yang luas, tetapi hanya dalam batas tertentu, yakni keterikatan pada objek yang relatif sempit seperti keterikatan pada agama/religi. Parokialisme dalam sistem politik yang diferensiatif lebih bersifat afektif dan orientatif dari pada kognitifnya.

2) Budaya Politik Subjek

Masyarakat menyadari adanya otoritas pemerintah. Secara umum masyarakat menerima segala keputusan yang diambil dan segala kebijakan pejabat yang berwenang dalam masyarakat. Bagi mereka yang prinsip adalah mematuhi perintah pemerintah, menerima, loyal dan setia terhadap anjuran, perintah, serta kebijaksanaan pemimpinnya. Dalam budaya politik subjek, orientasi dalam sistem politik lebih bersifat normatif dan afektif daripada kognitif.

3) Budaya Politik Partisipan

Masyarakat memiliki orientasi politik yang secara eksplisit ditujukan kepada sistem secara keseluruhan, bahkan terhadap struktur,

³¹ *Ibid*

proses dan administratif. Masyarakat memiliki kesadaran terhadap hak serta tanggung jawabnya. Masyarakat juga merealisasi dan mempergunakan hak-hak politiknya. Masyarakat dalam budaya politik partisipan tidaklah menerima begitu saja keputusan politik, masyarakat sadar, meskipun kecil mereka tetap memiliki arti bagi berlangsungnya sistem politik. Tingkah laku warga negara dalam budaya politik partisipan menggunakan pertimbangan rasional dan tidak sekedar emosional dalam menentukan pilihan atau mengambil kebijaksanaan.

Tidak semua norma berubah serentak, tetapi sesuai dengan sifat manusia, selalu ada kebutuhan manusia yang tidak berubah.

Di samping itu terdapat beberapa perubahan yang berlangsung lebih cepat dari pada yang lain, juga ada beberapa kelompok yang lebih mudah menyesuaikan diri daripada kelompok yang lain.

Sorokin³² melihat perubahan masyarakat dari segi psikologik yaitu bahwa perubahan terjadi karena:

- 1) *Ideational change* (perubahan idea)
- 2) *Sensational change* (pengaruh materi terhadap mental manusia)
- 3) *Idealistic change* (perubahan ideologi)

Manusia bersedia untuk mengadakan perubahan sikap (*attitude change*) jika dorongan dan kebutuhan “abadi” dapat dipenuhi. Begitu juga masyarakat, dalam perubahan masyarakat terutama dalam arti

³² S. Astrid Phil Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, Putra A. Bardin, Jakarta, 1999

perubahan yang kumulatif (*cumulatif change*), pada umumnya orang berusaha mengira-ngira arah perkembangan, meskipun usaha ini hanya merupakan spekulasi. Sehubungan dengan arah perubahan (*direction of change*) dapat dibuat tentang pola perubahan.

Pola perubahan suatu masyarakat, menurut Moore³³ secara umum sebagai berikut:

1) Perubahan Linear

Perubahan ini bersifat sederhana. Perubahan akan selalu kembali ke fase sebelumnya. Biasanya berlangsung dengan lambat dan dalam jangka pendek terdapat kecenderungan sebagai perubahan menurut garis lurus atau menurut siklus dengan meningkat, sedangkan dalam jangka panjang dapat berbentuk spiral yaitu kembali dalam tingkat keadaan yang sama tetapi lebih tinggi dan mempunyai efek lebih luas.

2) Perubahan Non linear

Perubahan non linear mewujudkan pertumbuhan dan kebhinekaan. Perubahan ini berbentuk perubahan yang bercabang dengan tendensi menaik. Perubahan radikal berlangsung dalam jangka waktu yang relatif cepat. Namun bagaimana dahsyatnya perubahan tergantung dari lingkungan dan manusianya sendiri.

³³ *Ibid*

D. Definisi Konsepsional

1. Pemilihan Umum

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan proses menerjemahkan aspirasi rakyat menjadi kebijakan publik guna menentukan jabatan politik seseorang, dalam hal ini adalah Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

2. Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah upaya warga masyarakat menggunakan kesempatan baik secara individu ataupun kelompok mewujudkan hak ikut serta dalam mengungkapkan pandangan, kepentingan, dan mempengaruhi proses perumusan pembentukan kebijakan publik dalam sebuah negara, untuk memberi suara, atau untuk menduduki jabatan pemerintahan.

3. Perilaku Pemilih

Perilaku pemilih adalah tindakan politik yang dimiliki massa pemilih pada pelaksanaan pemilu yang diwujudkan dalam menentukan pilihan politiknya, kecenderungan mengidentifikasi diri dengan partai yang memiliki basis ideologi tertentu maupun memilih partai berdasarkan program.

E. Definisi Operasional

1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Pilihan Politik

a. Pergeseran nilai yang dianut oleh pribadi dan kelompok masyarakat.

Didasarkan pada penerimaan secara rasional akan nilai-nilai suatu partai politik, penerimaan norma tingkah laku tokoh dari suatu partai politik.

Termasuk di dalamnya orientasi agama.

- b. Pilihan politik berbasis rasional tujuan. Didasarkan atas keuntungan pribadi atau golongan di dalam masyarakat.
- c. Identifikasi politik. Ikatan kuat atau lemahnya pemilih dengan partai politik atau kandidat. Para pemilih menunjukkan kecenderungan memiliki kesamaan pilihan partai politik antara orang-orang sekitar.
- d. Rekonfigurasi papan catur politik. Sebuah partai atau kandidat tertentu biasanya memiliki satu atau beberapa kelompok massa andalan (basis massa). Kelompok tersebut mempunyai preferensi kuat dan selalu memilih partai tertentu.
- e. Faktor kelas dan kelompok sosial lainnya. Karakteristik dan pengelompokan sosial yang meliputi usia, jenis kelamin, pekerjaan, latar belakang keluarga, aspek geografis, status ekonomi, kegiatan-kegiatan dalam kelompok formal dan informal dan lainnya memiliki peranan besar dalam membentuk sikap, persepsi, dan orientasi seseorang.
- f. Citra sosial. Citra kandidat atau partai dalam pengelompokan pemilih.
- g. Faktor kepemimpinan dan ketokohan. Figur tertentu memiliki kekuatan yang dapat menggerakkan masyarakat mencapai tujuan tertentu termasuk mempengaruhi perilaku pemilih.
- h. Efektual dan emosional. Terpancar dari kontestan partai atau kandidat melalui *policy* politik yang ditawarkan, pemilih mendasarkan pilihannya atas kesenangan atau kebencian terhadap suatu ide atau tokoh partai.
- i. Orientasi isu dan kebijakan politik. Tingkat pendidikan yang tinggi akan meningkatkan daya kritis masyarakat terhadap isu dan program yang

ditawarkan oleh kontestan pemilu kepada masyarakat. Isu dapat memicu keinginan para pemilih mengenai hal-hal baru.

- j. Orientasi kandidat. Pengaruh orientasi kandidat terhadap pola perilaku pilihan politik. Dengan sistem pemilu yang memilih partai, umumnya para pemilih tidak memperhatikan kandidat saat melakukan pencoblosan. Pada pemilu dengan sistem pemilihan tanda gambar partai dan nama kandidat, kandidat memberi pengaruh besar terhadap perilaku pemilih.
- k. Peristiwa mutakhir; himpunan peristiwa, isu, dan kebijakan yang berkembang menjelang dan selama kampanye yang mempunyai pengaruh baik langsung maupun tidak langsung kepada para pemilih.
- l. Peristiwa personal; kehidupan pribadi dan peristiwa yang pernah dialami secara pribadi oleh seorang kandidat.
- m. Perubahan lingkungan politik disertai dengan tersedia dan menguatnya aliran politik. Pasca Orde Baru partai peserta pemilu bermunculan menjadi kontestan, kebijakan ambang batas mematikan gerak langkah beberapa partai pada pemilu selanjutnya, namun pada agenda pemilu selanjutnya seringkali partai dengan aliran tertentu bermunculan.

2. Pola Perubahan Pilihan Politik Masyarakat

a. Perubahan Linear

Perubahan ini bersifat sederhana. Perubahan akan selalu kembali ke fase sebelumnya. Biasanya berlangsung dengan lambat dan dalam jangka pendek terdapat kecenderungan sebagai perubahan menurut garis lurus atau menurut siklus dengan meningkat, sedangkan dalam jangka panjang

dapat berbentuk spiral yaitu kembali dalam tingkat keadaan yang sama tetapi lebih tinggi dan mempunyai efek yang lebih luas.

b. Perubahan Non linear

Perubahan non linear mewujudkan pertumbuhan dan kebhinekaan. Perubahan ini berbentuk perubahan yang bercabang dengan tendensi menaik. Perubahan radikal berlangsung dalam jangka waktu yang relatif cepat. Namun bagaimana dahsyatnya perubahan tergantung dari lingkungan dan manusianya sendiri.

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pilihan politik masyarakat Kota Yogyakarta pada Pemilu Legislatif 2009.
- b. Untuk mengetahui pola perubahan pilihan politik masyarakat Kota Yogyakarta pada Pemilu Legislatif 2009.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bahan masukan positif bagi peneliti dalam mendapatkan pengetahuan mengenai pemilihan umum pada umumnya dan masalah partisipasi politik masyarakat pada khususnya.
- b. Memberikan masukan untuk pengembangan materi perkuliahan di Program Studi Ilmu Pemerintahan.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk pengembangan wawasan politik dan hukum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kilas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dengan memakai jenis penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.³⁴

2. Unit Analisa

Unit analisa adalah suatu bagian yang membuat sumber data berupa fakta-fakta yang dibutuhkan bagi keperluan memberi basis analisa terhadap masalah yang diteliti. Dengan kata lain unit analisa dapat diartikan sebagai satuan tertentu yang diperhitungkan akan menjadi subjek penelitian.

Unit analisa dalam penelitian ini meliputi masyarakat Kota Yogyakarta dan pejabat atau staf pemerintahan Kota Yogyakarta dan instansi terkait.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari 2 (dua) sumber, yaitu :

- a. Data primer, merupakan keseluruhan data hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara.

³⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998

- b. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari instansi terkait dan studi dokumentasi serta literatur-literatur, terutama yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Di sini digunakan teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpul data informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan lisan untuk dijawab secara lisan pula³⁵. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak berstruktur.

Wawancara dalam penelitian ini melibatkan warga Kota Yogyakarta yang mempunyai hak pilih aktif pada Pemilu Legislatif 2004 dan Pemilu Legislatif 2009, bertujuan untuk memperoleh keterangan lebih rinci dan mendalam mengenai pandangan, sikap, dan keyakinan subjek sehingga diperoleh informasi mengenai peristiwa, situasi dan keadaan tertentu dari masyarakat. Dari fenomena yang ada di lapangan, analisis data di dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Wawancara dilakukan dengan terlebih dahulu menyusun pertanyaan dalam bentuk pedoman wawancara, pedoman wawancara ini kemudian berfungsi sebagai kontrol pertanyaan yang

³⁵ Maman Rachman, *Strategi dan Langkah-langkah Penelitian Pendidikan*, IKIP Yogyakarta Press, Yogyakarta, 1999

perlu diajukan kepada responden untuk mendapatkan data yang diperlukan.

Selagi masih relevan pengembangan wawancara bisa saja secara bebas dilakukan saat berlangsungnya wawancara, namun dengan adanya pedoman wawancara arahnya bisa dikendalikan terpusat pada pokok persoalan tertentu.³⁶

b. Dokumentasi

Teknik atau studi dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip termasuk juga buku-buku yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian kualitatif teknik ini merupakan alat pengumpul data yang utama karena pembuktian hipotesisnya yang diajukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum, baik mendukung maupun menolak hipotesis tersebut³⁷.

Teknik dokumentasi sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan meramalkan. Studi dokumen digunakan untuk menganalisis dokumen, catatan, dan arsip yang merekam aktivitas warga masyarakat dalam proses pemilihan umum.

³⁶ Bagong Suyanto dan Sutinah (Ed.), *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, Cet. 5, Kencana, Jakarta, 2010. Hal: 78

³⁷ *Ibid*

Teknik ini dipergunakan untuk mendapatkan data dengan cara melihat data dari surat-surat/arsip-arsip, catatan-catatan, buku-buku, kamus dan dokumen-dokumen.

Data yang bersumber dari warga masyarakat (responden) dan informan yang dipilih dan ditentukan dalam penelitian ini. Dokumen di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta yang berkaitan dengan data hasil Pemilu Legislatif 2004 dan Pemilu Legislatif 2009, kondisi aktual lokasi penelitian yang diobservasi, dan pengayaan melalui studi kepustakaan yang relevan.

5. Teknik Analisa Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang akan digunakan yakni jenis penelitian deskriptif, maka teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa data kualitatif. Definisi analisa data kualitatif menurut Koentjaraningrat, teknik analisa data kualitatif adalah³⁸:

“Data yang dikumpulkan berupa studi kasus dan bersifat monografis, mudah diklasifikasikan dan jumlahnya sedikit serta data yang diperoleh dalam penelitian itu tidak dianalisis dengan menggunakan angka-angka melainkan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitiannya.”

Pendapat lainnya, menurut Lincolin Arsyad, teknik analisa data kualitatif adalah³⁹:

“Analisa data tanpa berdasarkan angka-angka perhitungan tetapi berdasarkan atas pandangan, pendapat dan pemikiran menganalisa data.”

Dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif maka data yang diperoleh penyusun adalah data-data yang berupa informasi, tulisan-tulisan,

³⁸ Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia, Jakarta, 1991

³⁹ Arsyad Lincolin, *Metode Penelitian*, BPFE UGM, Yogyakarta, 1998

pendapat para pakar maupun berupa sumber literatur lain. Dari sinilah kemudian penyusun mendeskripsikan bagaimana sesungguhnya penyelenggaraan Pemilu 2009 yang dilakukan KPUD Kota Yogyakarta.

Kentalnya dimensi partai politik saat ini, dapat menjadi perisai dan pembendung rasionalitas politik masyarakat dalam memilih partai politik, anggota legislatif, presiden dan wakilnya dalam pemilu-pemilu yang akan datang. Tapi, sejauh apa pun itu, keberhasilan memilih pilihan terbaik itu semua tergantung dari hati nurani masyarakat itu sendiri dalam menumpahkan perasaan politiknya.

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah model analisis interaksi, dimana komponen reduksi data dan sajian data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Setelah data terkumpul, maka tiga komponen analisis (reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan) berinteraksi.

Tahap-tahap yang dilakukan oleh peneliti di lapangan diuraikan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

- 1) Data yang telah terkumpul dipilih dan dikelompokan berdasarkan data yang mirip atau sama.
- 2) Data itu kemudian diorganisasikan untuk mendapatkan kesimpulan data sebagai bahan penyajian data.

b. Penyajian Data

Setelah data diorganisasikan, selanjutnya data disajikan dalam uraian-uraian naratif yang disertai dengan bagan atau tabel untuk memperjelas penyajian data.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan dengan teknik triangulasi data. Triangulasi data adalah pengecekan secara berulang kali dengan upaya membandingkan satu kejadian dengan kejadian lainnya, pernyataan narasumber satu dengan narasumber lainnya serta melakukan *cross check* terhadap data di lapangan.